

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini pondok pesantren tidak hanya dijadikan sebagai lembaga pendidikan namun dijadikan sebagai kendaraan transformasi antara masyarakat dan pemerintah meskipun tadinya pondok pesantren hanya dijadikan sebagai pusat pendidikan keagamaan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu kebutuhan politik memaksa untuk menjadikan pondok pesantren sebagai jembatan informasi terhadap masyarakat yang memiliki ideologi bahwa pesantren adalah pusat dari segala ilmu dan segala permasalahan yang terjadi.

Oleh karena itu pondok pesantren memiliki peran tidak hanya sebagai pusat pendidikan agama di masyarakat namun sebagai penengah dalam pemilihan politik yang terjadi. Banyak program pembangunan yang diupayakan masuk ke pesantren, atau diintroduksi ke masyarakat lewat legitimasi kiyai agar program tersebut sukses sesuai dengan tujuan pembangunan karena pondok pesantren telah membantu dalam kesuksesan pemerintahan desa yang bahkan selanjutnya akan membantu kepentingan pemerintahan yang lebih tinggi.

Pesantren sebagai salah satu pemicu terwujudnya kohesi sosial. Peran semacam ini diperoleh karena pesantren hadir terbuka dengan semangat kesederhanaan, kekeluargaan, dan kepedulian sosial. Di antara beberapa fungsi pesantren, pertama, pesantren sebagai pusat keilmuan dan pelestarian tradisi lokal berbasiskan Islamic studies

Kedua, sebagai pendidikan moral bangsa. Dalam konteks perjalanan politik Indonesia, diakui atau tidak, pesantren telah bergeser menjadi salah satu bagian dari media kampanye politik yang mempunyai magnet yang sangat luar biasa. Terbukti, pesantren sering dijadikan dalil argumentatif dan afirmasi bagi politikus dalam merebut kekuasaan. Menjelang pesta pilkada serentak bahkan Pemilihan Kepala Desa, tidak sedikit calon kandidat memberikan bantuan agar mendapat dukungan dari kiyai sebagai otoritas tertinggi di pesantren.

Bagi politikus, berkampanye dengan melibatkan pesantren dianggap sangat taktis dan strategis untuk meraup simpati masyarakat. Kategorisasi taktis karena sebagian besar masyarakat, terutama di Pulau Jawa pernah *nyantri* (alumni) di beberapa pesantren yang ada. Dan dianggap strategis karena di kalangan tertentu pesantren mempunyai otoritas fatwa politik yang mampu menjadi magnet untuk meyakinkan masyarakat, terlebih bagi alumninya sendiri.

Keterlibatan kiyai-santri dalam politik praktis sebenarnya merupakan bagian kecil wajah lama dari konfigurasi politik nasional. Namun, sejak era reformasi 98, geliat politik kiyai kian marak mewarnai panggung perebutan kekuasaan. Fenomena ini telah banyak menyita perhatian publik hingga pada level masyarakat perifer karena selama ini ketokohan kiyai di beberapa daerah dikenal luas sebagai pendidik moral dan intelektual umat dengan melakukan dakwah ajaran agama Islam.

Sudah bukan menjadi rahasia umum, para kiyai dan santri selalu punya pilihan dan orientasi politik yang jelas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman sesuai dengan pemahamannya. Karena itu, seringkali muncul perbedaan

sengit antara kiyai-santri dalam sikap politik. Bahkan, berujung pada komunikasi yang tersendat di antara mereka. Pada konteks ini, perpecahan itu menjadi fakta yang terkadang tidak terbantahkan.

Masyarakat yang di dalamnya para alumni pesantren dan pesantren itu sendiri tidak ubahnya dua mata sisi uang. Masing-masing saling bergantung dan pengaruh mempengaruhi. Keberadaan dan situasi masyarakat akan mempengaruhi sistem program pesantren. Program di pesantren juga dapat menentukan model budaya masyarakat. Sementara itu, mekanisme pembinaan di pesantren sedikit banyak dipengaruhi oleh *performance* kiyai. Dalam keadaan demikian, peran kiyai terhadap perubahan sistem nilai masyarakat sedemikian besar. Kiyai bahkan punya potensi untuk membolak balik nilai baku yang telah berkembang sebelumnya dengan kondisi hubungan antara pesantren dan masyarakat di atas, maka hal inilah yang dimanfaatkan oleh para politikus.

Para politikus dari tingkat atas bahkan sampai tingkat bawahpun menyadari terhadap situasi psikologi sosial peran kiyai-santri dan masyarakat dalam menghadapi setiap musim kontestasi pemilihan pimpinan daerah masing-masing. Kesadaran dan pemahaman para politikus tersebut menjadi salah satu acuan untuk menarik suatu simpati dari masyarakat untuk mencapai suara dan kepercayaan menjadi pimpinan kepala daerah dan termasuk di dalamnya adalah pimpinan daerah yang paling dekat bersinggungan langsung dengan pesantren dan masyarakat, yakni para calon kepala desa.

Salah satu pesantren yang menarik untuk diteliti adalah pesantren Al-Choeriyah yang terletak di Kampung Cibeas Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna

Kabupaten Tasikmalaya. Pondok pesantren tersebut mempunyai peranan dan andil besar dalam menentukan kemenangan salah satu calon kepala desa yang dilaksanakan pada Pilihan Kepala Desa (Pemilihan Kepala Desa) tahun 2018.

Bertitik tolak atas pemikiran dan keadaan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui peran pondok pesantren Al-Choriayyah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Cintaraja tahun 2018 yang dituangkan ke dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi dengan judul **“PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA”** (Studi Kasus Peran Pondok Pesantren Al-Choeriyah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Cintaraja Kecamatan Singaparana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dalam suatu perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pondok Pesantren Al-Choeriyah pada saat Pemilihan Kepala Desa di Desa Cintaraja pada Tahun 2018 ?
2. Bagaimana bentuk partisipasi politik Pondok Pesantren Al-Choeriyah pada saat Pemilihan Kepala Desa di Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Pondok Pesantren Al-Choeriyah pada saat Pemilihan Kepala Desa di Cintaraja pada Tahun 2018

2. Untuk mengetahui bentuk partisipasi politik Pondok Pesantren Al-Choeriyah pada saat Pemilihan Kepala Desa di Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2018? Untuk mengetahui bentuk apa saja peran Pondok Pesantren Al-Choeriyah pada saat Pemilihan Kepala Desa di Desa Cintaraja pada Tahun 2018.

D. Pembatasan Masalah

Penulis melakukan pembatasan masalah untuk fokus dan terarah pada saat melakukan penelitian. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Peran Pondok Pesantren Al-Choeriyah pada saat Pemilihan Kepala Desa Cintaraja pada tahun 2018.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang di atas, maka manfaat penulisan ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Teoritis

Kegunaan Sebagai Akademisi, penulis tentunya lebih percaya diri berharap tulisan ini dapat dijadikan rujukan pembeding atas tema-tema serupa yang telah hadir sebelumnya.

2. Praktis

Kegunaan praktis tulisan ini adalah sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana (strata satu) di bidang ilmu politik dan menjadi landasan dalam memahami konteks peranan pondok pesantren dalam pemilihan Kepala Desa Cintaraja tahun 2018.